

**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) DALAM PERSPEKTIF DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE***

Nama : Rizky Novian Hartono
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Sriwati, S.H., M.Hum
Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

ABSTRAK

BUMN sebagai pelaku perekonomian nasional merupakan salah satu bentuk konkret perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yakni memajukan kesejahteraan umum. BUMN secara konstitusional menjalankan kewenangan untuk menguasai cabang-cabang produksi penting yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak yang tidak dapat dikelola oleh badan usaha lainnya dengan salah satu tujuan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Layaknya sebuah perusahaan, BUMN Persero sebagai salah satu bentuk BUMN pasti akan mengalami keuntungan maupun kerugian akibat dinamisnya dunia bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme pandangan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan dalam lingkup keuangan negara sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran makna kerugian keuangan negara. Lebih jauh, hal ini berdampak pada bentuk pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Direksi BUMN Persero ketika terjadi kerugian pada tubuh BUMN sebab direksi BUMN Persero selalu berada dibawah bayang-bayang sanksi pidana. Padahal kerugian pada BUMN tidak hanya dapat terjadi akibat dari adanya penyalahgunaan wewenang melainkan akibat dari adanya risiko bisnis sehingga doktrin *business judgment rule* dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi direksi dari tuntutan pidana. Tidak selarasnya pemahaman ini di kalangan aparat penegak hukum justru akan menghambat tercapainya hakekat didirikannya sebuah BUMN sebagai bagian untuk menciptakan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Kata kunci: BUMN Persero, kekayaan negara yang dipisahkan, kerugian keuangan negara, *business judgment rule*

**STATE FINANCIAL LOSSES IN THE STATE-OWNED ENTERPRISES (BUMN) IN THE
PERSPECTIVE OF DOCTRINE BUSINESS JUDGMENT RULE**

Name : Rizky Novian Hartono
Dicipline/Study Programme : Law/Legal Study
Contributors : Sriwati, S.H., M.Hum
Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

ABSTRACT

State-Owned Enterprises as national economic actors are one of the concrete forms of the extension of the state's hands in realizing the ideals of the nation and the state, namely promoting public welfare. State-Owned Enterprises constitutionally exercise authority to control important production branches relating to the livelihoods of many people which cannot be managed by other business entities with one of the aims to contribute to the development of the national economy in general and state revenue in particular. Like a company, State-Owned Enterprises Persero as a form of State-Owned Enterprises will surely experience advantages and disadvantages due to the dynamic of the business world. The research method used is the statute approach and conceptual approach. The result showed that there is a dualism view about the position of separated-state wealth in the scope of state finances resulting in different interpretations of the meaning of state financial losses. Furthermore, this has an impact on the form of accountability that is asked to the directors of the State-Owned Enterprises when there is a loss to the State-Owned Enterprises body because the directors of the State-Owned Enterprises are always under the shadow of criminal sanctions. Though, losses to State-Owned Enterprises can not only occur as a result of abuse of power but are result of business risks so the directors can be protected by the doctrine of business judgment rule from criminal charge. This uncertainty will actually hamper the achievement of the essence of establishing an State-Owned Enterprises as part of creating a welfare state.

Keywords: *State-Owned Enterprises, separated-state asset, state financial losse, business judgment rule*